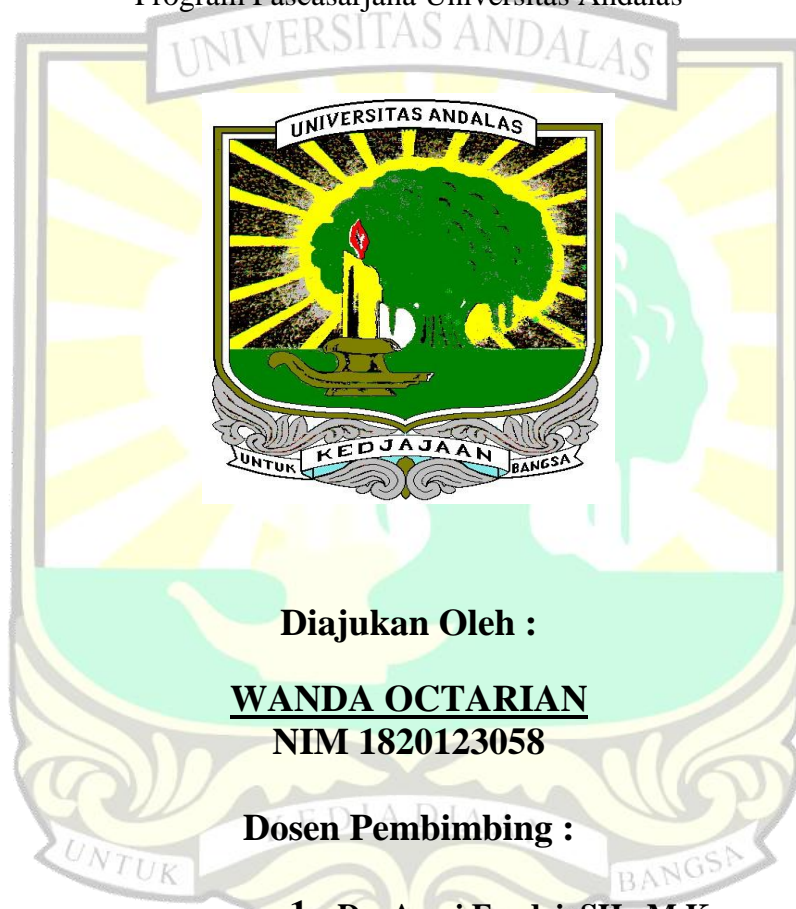


**PELAKSANAAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN (*MARRIAGE AGREEMENT*) YANG BERBENTUK AKTA
NOTARIS
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada
Program Pascasarjana Universitas Andalas



Diajukan Oleh :

WANDA OCTARIAN

NIM 1820123058

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn**
- 2. Dr. Delfiyanti, SH., MH**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

**PELAKSANAAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN
(MARRIAGE AGREEMENT) YANG BERBENTUK AKTA NOTARIS
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020)**

**Tesis, S2, Wanda Octarian, 1820123058
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas**

ABSTRAK

Perjanjian kawin/pranikah yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Pokok permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris di Kabupaten Kampar tahun 2020 dan apa sajakah hambatan-hambatan dan upaya pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, Pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris di Kabupaten Kampar tahun 2020 yaitu harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan di hadapan notaris, dibuat oleh para pihak yaitu calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri di hadapan notaris, isi akta perjanjian kawin, mengenai pemisahan harta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian perkawinan termasuk mengenai pemisahan harta suami dan istri pada saat sekarang ini dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dari pada itu notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena notaris berwenang membuat akta otentik yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin, perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan upaya pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris yang paling sering terjadi yaitu dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : Pemisahan Harta, Perjanjian Perkawinan, Notaris

**IMPLEMENTATION OF SEPARATION OF ASSETS IN A MARRIAGE
AGREEMENT IN THE FORM OF A NOTARY DEED
(CASE STUDY IN KAMPAR DISTRICT IN 2020)**

*Thesis, S2, By Wanda Octarian, 1820123058
Notary Master Program, Faculty of Law, Andalas University*

ABSTRACT

The marriage/prenuptial agreement is an agreement made before the marriage takes place and binds both parties to the bride and groom who will be married and is valid since the marriage took place. The main problem is how to implement the separation of assets in a marriage agreement (marriage agreement) in the form of a notarial deed in Kampar Regency in 2020 and what are the obstacles and efforts to implement the separation of assets in a marriage agreement (marriage agreement) in the form of a notarial deed. This legal research uses an empirical juridical approach, namely a study that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then connecting them with the legal facts found in the field. In this study, the data sources were obtained from library research and field research. Data collection techniques were carried out through document studies and structured interviews. The results of the study, the implementation of the separation of assets in a marriage agreement (marriage agreement) in the form of a notarial deed in Kampar Regency in 2020, which must be made with a notarial deed carried out before a notary, made by the parties, namely the prospective husband and the prospective wife or husband and wife in front of the notary, the contents of the marriage agreement deed, regarding the separation of assets must not conflict with Islamic law and/or the provisions of the applicable laws and regulations, marriage agreements including the separation of husband and wife assets are currently officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) . Therefore, a notary has a very important authority in making a marriage agreement because a notary has the authority to make an authentic deed contained in 15 Paragraph 1 of the UUJN. Obstacles in implementing the separation of assets in a marriage agreement (marriage agreement) in the form of a notarial deed, namely husband and wife have bad intentions in terms of debts owed to third parties, the prospective husband or wife violates the contents of the marriage agreement, during the marriage the husband or wife violates the contents of the marriage agreement , there is a civil dispute regarding the contents of the marriage agreement, the agreement can only be changed with the consent of both husband and wife, and does not harm the interests of third parties, and is legalized by the marriage registrar. Meanwhile, the effort to implement the separation of assets in a marriage agreement (marriage agreement) in the form of a notarial deed that most often occurs is carried out by litigation or non-litigation.

Keywords : Separation of Assets, Marriage Agreement, Notary

